

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

Ichwal Farizan Nugraha Karubuy  
NPP. 31.1081

*Asdaf Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat*  
Studi Kebijakan Publik  
Email: [sahrulkazama@gmail.com](mailto:sahrulkazama@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ibu Dr. Roslianah, M.Pd

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP)** *The District of Wondiboi in Teluk Wondama Regency, West Papua Province, experiences an annual increase in the number of stunting cases. Numerous obstacles hinder optimal implementation, prompting the Teluk Wondama Regency Government to adopt a stunting reduction policy based on Regent's Decree No. 13 of 2019 on Stunting Reduction. **Purpose:** This research aims to analyze the implementation of the Stunting Reduction Policy in Teluk Wondama Regency, West Papua Province. **Method:** The research approach used is qualitative, utilizing Van Meter and Carl Van Horn's implementation theory (Wahab, 2014), along with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques employed include data presentation, data analysis, data triangulation, and drawing conclusions to review the stunting reduction policy in Wondiboi District, Teluk Wondama Regency, which has been implemented effectively but not optimally. **Result :** The implementation of the Stunting Reduction Policy in Wondiboi District, Teluk Wondama Regency, West Papua Province shows varied results. The Policy Standards and Objectives and Resources are still not optimal, marked by an increase in stunting cases and a lack of resources. The characteristics of the Implementing Organization, Inter-Organizational Communication, and Attitudes of Implementers have achieved optimal levels. The Environment dimension is not yet optimal, as indicated by the limited public awareness and the increase in stunting cases. **Conclusion:** The implementation of the Stunting Reduction Policy in Wondiboi District shows that while some dimensions such as Organizational Characteristics, Communication, and Implementers' Attitudes are optimal, the dimensions of Standards and Objectives, Resources, and Environment still require improvement. Supporting factors include local policies and good coordination, while hindering factors are resource shortages and public awareness. Further efforts are needed to achieve more effective stunting reduction.*

**Keywords:** : *Implementation, Policy, Stunting*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP)** bahwa Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat setiap tahun mengalami peningkatan jumlah stunting. Masih terdapat banyak hambatan di dalamnya sehingga membuat pelaksanaannya belum optimal, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengambil langkah kebijakan penurunan stunting berdasar Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. **Tujuan:** Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi

Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. **Metode:** Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Implementasi dari teori Van Meter dan Carl Van Horn (wahab, 2014) serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data, analisis data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan dalam menelaah kebijakan penurunan stunting di Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama telah berjalan dengan baik meskipun belum optimal dalam pelaksanaannya. **Hasil/Temuan:** Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat menunjukkan hasil beragam. Standar dan Tujuan Kebijakan serta Sumber Daya masih belum optimal, ditandai dengan peningkatan angka stunting dan kekurangan sumber daya. Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, dan Sikap Para Pelaksana telah mencapai optimalitas. Lingkungan belum optimal, terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat dan peningkatan angka stunting. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Distrik Wondiboi menunjukkan bahwa meskipun beberapa dimensi seperti Karakteristik Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Para Pelaksana telah optimal, dimensi Standar dan Tujuan, Sumber Daya, dan Lingkungan masih memerlukan perbaikan. Faktor pendukung termasuk kebijakan lokal dan koordinasi yang baik, sementara faktor penghambat adalah kekurangan sumber daya dan pengetahuan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai penurunan stunting yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Stunting

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia yang dapat memberi dampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga permasalahan stunting ini harus segera diatasi (Agustino, 2006). Stunting adalah ketika seseorang memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata usianya, menunjukkan kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan (Fallo, 2021). Ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan tinggi badan atau panjang badan dengan usia seseorang (PB/U dan TB/U). Balita adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap stunting ini. (Kemenkes, 2018). Salah satu golongan yang rawan untuk mengalami stunting adalah balita.

Menurut WHO (2015), stunting mengalami perubahan dalam pengertiannya. Kondisi ini merujuk pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh defisiensi gizi kronis dan infeksi berulang. Dengan karakteristik anak yang menunjukkan tinggi atau panjang badan di bawah rata-rata yang seharusnya. Namun, menurut WHO, stunting didefinisikan sebagai tinggi badan yang pendek atau sangat pendek sesuai dengan usia anak, yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti asupan nutrisi yang tidak mencukupi dan/atau infeksi yang berulang atau kronis, yang bersifat tidak dapat dipulihkan dan terjadi dalam rentang 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Permasalahan stunting ini harus bisa di atasi oleh pemerintah karena berkaitan dengan kesehatan dan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional, serta merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk mengatasi angka stunting maka di keluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Shaum, 2021). Regulasi ini bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, sejalan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu, regulasi ini mengintensifkan

pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting, meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga, menjamin asupan gizi yang memadai, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta memperluas jangkauan akses air minum dan sanitasi (Fahrizi,2021).

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini menyoroti Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 angka stunting secara nasional mengalami penurunan prevalensi stunting di Indonesia dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022 capaiannya tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu sekitar 2,7% setiap tahunnya. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa upaya pelaksanaan kebijakan pemerintah

untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia telah menghasilkan dampak yang positif dan signifikan. Dari kurun waktu tersebut daerah-daerah lain mengalami penurunan dan peningkatan stunting. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat yang mengalami kenaikan 26,2% menjadi 30% pada tahun 2022. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada urutan pertama tingkat prevalensi stunting tertinggi sementara Provinsi Papua Barat berada pada urutan keenam. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di NTT mencapai 37,8% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 35,3%. Sebaliknya, pada tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Papua Barat mencapai 26,3% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 30,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan stunting di Provinsi Papua Barat dari tahun 2021 ke 2022 sebesar ,8%.

### Jumlah Stunting Di Provinsi Papua Barat

NO	Kabupaten	Jumlah Stunting	
		2021	2022
1	Pegunungan Arfak	40,10%	51,50%
2	Manokwari	26,90%	36,60%
3	Kaimana	28,50%	29,20%
4	Fak-Fak	26,00%	29%
5	Manokwari Selatan	28,50%	27,20%
6	Teluk Wondamai	28,50%	26,10%
7	Bintuni	27,50%	22,80%

Sumber : Suvei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan

Dapat dilihat di tabel diatas bahwa jumlah stunting tertinggi di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Arfak dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan stunting dengan jumlah stunting 51.50%, sedangkan Kabupaten Teluk Wondama berada di urutan ke enam dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan jumlah stunting dari 28,50% menjadi 26,10%. Meski Kabupaten Teluk Wondama mencatatkan keberhasilan dalam mengatasi stunting, Pemerintah harus mengingat agar strategi percepatan penurunan stunting tetap dilakukan, Apalagi mengingat angka penurunan masih belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 14% pada tahun 2024.

Untuk mengatasi permasalahan penurunan stunting di Kabupaten Teluk Wondama, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mempercepat penurunan stunting. Namun, dilihat dari data tingkat penurunan stunting di Kabupaten Teluk Wondama dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami

penurunan, yakni tahun 2021 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah mengalami keberhasilan dalam menurunkan angka stunting akan tetapi belum optimal sesuai target nasional yaitu 14%.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Inspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya ini memberikan wawasan yang sangat berharga bagi peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan organisasi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan menjadi kunci untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam menangani permasalahan stunting di wilayah yang diteliti seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilia Kinanti dan Rahmadani Yusran (2022) bertajuk "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini fokus pada upaya pencegahan stunting melalui kegiatan posyandu berkelanjutan, kunjungan ke rumah balita, dan pelatihan kader nagari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal, disebabkan oleh faktor-faktor seperti kepentingan lingkungan, kondisi sosial ekonomi, peran agen pelaksana, dan keterbatasan sumber daya organisasi. Faktor-faktor ini menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan yang efektif.

Anggara Setya Saputra, Suryoto, dan Chamid Sutikno (2022) dalam penelitiannya "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga" juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada deskripsi proses implementasi kebijakan dari sisi aturan dan keterlibatan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman peraturan daerah dan keputusan bupati, dengan melibatkan kelompok pemerintah, organisasi komunitas psikiatri, dan masyarakat. Namun, tantangan terkait aspek sosial dan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi kendala utama dalam upaya penanggulangan stunting. Penelitian oleh Dian Rosa Sunaryo, Candra Dewini, dan Ria Arifianti (2021) dengan judul "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung" mengadopsi metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Perbup Bandung No 74 Tahun 2019 yang bertujuan mempercepat pencegahan dan penanggulangan stunting. Meskipun berbagai intervensi telah dilaksanakan, baik yang bersifat gizi sensitif maupun spesifik, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut belum berhasil menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung, terutama disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan program-program terkait.

Ilham Nur Hanifan Maulana, Qomariyatus Sholihah, dan Wike (2022) dalam penelitian "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang" menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kabupaten Malang dan kebutuhan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 yang didanai oleh APBD, DAK Non-Fisik, dan BOK. Pelaksanaan kebijakan melibatkan pejabat gizi Dinas Kesehatan, petugas gizi puskesmas, bidan desa, dan kader. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya regulasi dan dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan yang efektif. Penelitian oleh Erina Fahzira (2021) berjudul "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar" menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model konseptual berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kabupaten Kampar dan bertujuan

untuk mengetahui implementasi kebijakan penurunan stunting. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal, ditandai dengan kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kurangnya sosialisasi, tidak adanya tim khusus, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan penurunan stunting di Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dengan menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Carl Van Horn (wahab, 2014). Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada evaluasi kebijakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, mengungkap bahwa meskipun terdapat optimalitas dalam Karakteristik Organisasi, Komunikasi Antar Organisasi, dan Sikap Para Pelaksana, dimensi seperti Standar dan Tujuan Kebijakan serta Sumber Daya masih belum memadai. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengetahuan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan stunting, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Melalui metode kualitatif dengan teknik triangulasi data, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai hambatan dan faktor pendukung dalam upaya penurunan stunting, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

## **II. METODE**

Pendekatan penelitian adalah “sebuah cara bagi peneliti untuk mengambil data penelitian secara ilmiah yang berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan” (Sujarweni, 2019). Pendekatan ini pada dasarnya melibatkan pembuatan rencana tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk cara berpikir, membayangkan, dan memvisualisasikan proses penelitian. Dua pendekatan utama dalam penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif. Menurut Yusuf (2017), “pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami dan mengungkapkan makna yang dalam tentang suatu keadaan atau objek, baik itu melalui gambaran maupun kata-kata.” Sebaliknya, pendekatan kuantitatif lebih sesuai ketika data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yang dapat dianalisis menggunakan teknik-teknik statistik. Bodgan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Sujarweni (2019), menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati.” Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mendeskripsikan fenomena yang diamati di lapangan dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena fokus analisis datanya bukan untuk menguji kebenaran atau kekeliruan hipotesis (jika ada), melainkan untuk memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang diamati. Menurut Moleong (2017) “metode deskriptif merupakan pendekatan untuk mendapatkan fakta-fakta yang dianalisis secara tepat. Penelitian deskriptif memfokuskan pada pemahaman masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, norma-norma yang berlaku, dan konteks-konteks khusus, termasuk hubungan-hubungan, perspektif-perspektif, aktivitas-aktivitas, sikap-sikap, serta proses-proses yang terjadi dalam suatu fenomena tertentu.” Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Penurunan Stunting di Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Metode induktif yang diterapkan memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data lapangan dengan memperhatikan konsep umum yang kemudian dijabarkan menjadi konsep yang lebih spesifik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menunjukkan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting, angka stunting masih meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah tersebut. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) serta data dari dokumen Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, analisis dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini.

Kabupaten Teluk Wondama menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019. Kebijakan ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dengan tujuan utama untuk mengurangi prevalensi stunting yang meningkat di Distrik Wondiboi. Kabupaten ini, sebagai bagian dari Provinsi Papua Barat, memiliki otonomi daerah sesuai dengan Pasal 6 Bab 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat jumlah penduduk Teluk Wondama pada tahun 2020 mencapai 41.644 jiwa, meningkat menjadi 45.980 jiwa pada akhir 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan populasi yang signifikan, namun juga menunjukkan tantangan dalam upaya penurunan stunting. Tabel 4.6 menunjukkan data balita dan prevalensi stunting di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2021 dan 2022. Di Distrik Wondiboi, angka stunting meningkat dari 3,18% pada 2021 menjadi 23,8% pada 2022, menjadikannya daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di kabupaten tersebut. Hal ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah.

#### Jumlah Balita Dan Stunting Di Distrik Wondiboi

No	Nama Desa	Jumlah Balita		Jumlah Stunting		Prevalensi (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Wondiboi	96	98	12	17	12,50 %	17,3%
2	Isuy	89	87	2	21	2,24%	24,15
3	Kabouw	90	101	3	29	3,33%	28,7%
4	Kaibi	70	96	2	17	2,86%	17,7%
5	Isei	117	129	1	32	0,85%	25,5%
6	Rasiei	65	74	3	13	4,61%	37,8%
7	Torey	63	74	5	28	7,94%	17,5%
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	590	659	28	157	3,18%	23,8%

Sumber : Kantor Dinas Kesehatan Teluk Wondama, 2023

Pemerintah Teluk Wondama telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting, termasuk verifikasi dan pembaharuan data melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), pemanfaatan anggaran untuk keluarga berisiko stunting, pemberian asupan nutrisi tambahan bagi bayi 0-23 bulan, edukasi tentang pencegahan stunting, rujukan bagi bayi berisiko stunting, pembangunan rumah sehat, dan pola keluarga asuh stunting melalui kolaborasi dengan masyarakat, lembaga keagamaan, dan mitra lainnya.

Namun, data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Tabel 4.7 yang memaparkan jumlah dan tempat tugas Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis, seperti bidan, perawat, dan ahli gizi masih kurang di setiap distrik. Kekurangan ini menghambat upaya penurunan stunting secara maksimal. Tim Pendamping Keluarga bertugas memberikan arahan kebijakan, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, memfasilitasi pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Peneliti juga menganalisis implementasi kebijakan menggunakan enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial-ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Dari wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, ditemukan bahwa standar acuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 sudah ada, namun masih dirasa kurang, sehingga dibuatlah Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting. Meskipun demikian, tujuan kebijakan ini belum tercapai, karena angka stunting masih tinggi.

Sumber daya manusia juga menjadi kendala, dengan kurangnya tenaga medis yang berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya finansial juga terbatas, yang menyebabkan program-program kesehatan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan bahwa peran organisasi dalam implementasi kebijakan perlu ditingkatkan, dengan komitmen dan kesiapan yang lebih baik dalam mengatasi stunting.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dan kebijakan yang diterapkan, penurunan stunting di Distrik Wondiboi belum tercapai secara optimal. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak, peningkatan sumber daya manusia dan finansial, serta peningkatan peran organisasi pelaksana untuk mencapai target penurunan stunting yang diharapkan. Hal ini penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama..

### **3.2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.**

Penerapan upaya dalam penurunan stunting peneliti akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, sebagai berikut :

- a. Adanya Kebijakan Pendukung Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Upaya pertama adalah Kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting di Distrik Wondiboi Provinsi Papua Barat. Dimana peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penurunan stunting yang terjadi di Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama.

- b. Adanya Kebijakan Pendukung Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting. Upaya lainnya, adanya Tim Percepatan Keluarga Penurunan Stunting yang dikeluarkan pemerintah daerah guna membantu dalam percepatan penurunan stunting secara cepat dan efektif. Dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan ketua tim pendamping keluarga stunting pada hari senin tanggal 15 pukul 13.00 WIT mengatakan bahwa “adanya tim pendamping keluarga percepatan penurunan stunting ini pemerintah berharap dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di distri- distrik di kabupaten teluk wondama.” Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas dimana salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu membentuk tim pendamping keluarga percepatan penurunan stunting di Distrik-distrik Kabupaten Teluk Wondama.
- c. Adanya Koordinasi Yang Baik Dibangun Antar Instansi Dengan adanya kordinas yang baik antara Dinas-dinas yang terkait memudahkan urusan dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala bidan kesehatan Selama ini kami memiliki koordinasi yang baik dengan Dinas-dinas yang terkait. Koordinasi yang kami lakukan juga dengan masyarakat setempat agar memberikan informasi ditemukan adanya balita yang terkena penyakit agar bisa di atasi secara cepat. Yang menjadikan organinsasi kuat salah satu kuncinya adalah koordinasi yang baik. Selain itu peneliti juga mewawancarai kepala puskesmas wondiboi ibu Lusinda Kubiari,SKM pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 WIT menyatakan bahwa: Koordinasi antara puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat pentingdalam penanggulangan masalah stunting. puskesmas secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan memiliki akses langung ke tentang data kesehatan masyarakat di distrik masing-masing. Jadi koordinasi antara masing-masing pihak sangat diperlukan dalam penanggulangan stunting. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang kesehatan dan kepala puskesmas peneliti mendapat informasi bahwa dalam upaya mengatasi stunting Dinas-dinas yang terkait memiliki hubungan kerjasama yang baik maupun dengan masyarakat.
- d. Edukasi Kepada Masyarakat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Teluk Wondama tentang apa itu stunting dan dampak apa yang dialami balita. Dan juga memastikan pendataan seluruh pengantin, ibu hamil dan balita. memastikan balita dan ibu hamil ke posyandu. Intervensi pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi dan juga melakukan pencatatan hasil ke dalam informasi e-PPGBM sekaligus melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap intervensi serentak.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Perbandingan antara penelitian peneliti tentang implementasi kebijakan penurunan stunting di Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, dengan penelitian Erina Fahzira (2021) mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar, mengungkapkan beberapa temuan utama yang menarik terkait efektivitas kebijakan, faktor-faktor penghambat, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

Penelitian di Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, menunjukkan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting, angka stunting justru meningkat. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di distrik ini mencapai 23,8%, naik dari 3,18% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum efektif dalam menurunkan angka stunting. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini termasuk kurangnya sumber daya manusia dan finansial, serta koordinasi yang belum optimal antara berbagai instansi terkait.

Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting, peningkatan edukasi masyarakat, dan verifikasi data melalui E-PPGBM, tantangan masih besar terutama terkait dengan keterbatasan tenaga medis dan sumber daya.

Sebaliknya, penelitian Erina Fahzira di Kabupaten Kampar menggunakan model konseptual Edward III, yang menilai implementasi kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar juga belum optimal. Aspek komunikasi yang tidak maksimal menyebabkan sosialisasi kebijakan tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, meskipun sarana dan prasarana sudah memadai. Disposisi pelaksana juga belum optimal karena penempatan staf yang kurang memperhatikan kapasitas, serta kurangnya insentif yang mempengaruhi motivasi kerja. Struktur birokrasi yang kurang mendukung dengan tidak adanya tim khusus untuk penanganan stunting juga menjadi penghambat.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa kedua penelitian mengungkapkan masalah utama dalam implementasi kebijakan penurunan stunting adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan komunikasi yang tidak efektif. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan wilayah penelitian, temuan utama menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Selain itu, koordinasi yang baik antar instansi dan pembentukan tim khusus yang fokus pada penurunan stunting juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Rekomendasi dari kedua penelitian mencakup peningkatan sosialisasi kebijakan, pembentukan tim khusus untuk menangani stunting, dan penempatan staf yang berkompeten. Di Kabupaten Teluk Wondama, disarankan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan, serta menambah tenaga medis dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesehatan. Sementara itu, di Kabupaten Kampar, disarankan untuk mengadakan sosialisasi langsung ke setiap daerah, membentuk tim khusus, dan memberikan insentif kepada pelaksana kebijakan untuk meningkatkan motivasi kerja.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan konteks regional, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di kedua daerah ini memiliki kesamaan yang signifikan. Solusi yang diusulkan oleh kedua penelitian juga saling melengkapi, menekankan pentingnya sumber daya yang memadai, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan kebijakan penurunan stunting yang diharapkan.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menunjukkan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, angka stunting justru meningkat dari 3,18% pada tahun 2021 menjadi 23,8% pada tahun 2022. Kebijakan yang ada belum efektif dalam menurunkan prevalensi stunting. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan finansial serta koordinasi yang belum optimal antara instansi terkait menjadi penghambat utama. Upaya-upaya seperti pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting, edukasi masyarakat, dan verifikasi data melalui E-PPGBM belum cukup mengatasi tantangan ini. Dibandingkan dengan penelitian di Kabupaten Kampar yang menunjukkan masalah serupa, rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi kebijakan, pembentukan tim khusus, dan peningkatan sumber daya manusia serta alokasi anggaran.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini terbatas pada data dari Distrik Wondiboi dan mungkin tidak mencerminkan kondisi di daerah lain di Kabupaten Teluk Wondama atau Papua Barat. Selain

itu, keterbatasan tenaga medis dan sumber daya finansial menghambat implementasi kebijakan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** : Penelitian di masa depan perlu memperluas cakupan wilayah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan penurunan stunting di berbagai daerah. Selain itu, studi mendalam tentang strategi peningkatan sumber daya manusia dan finansial, serta evaluasi efektivitas koordinasi antarinstansi, sangat penting. Penelitian juga harus mempertimbangkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan hambatan spesifik di lapangan. Pengembangan model intervensi berbasis komunitas dan pengujian dampaknya terhadap prevalensi stunting juga direkomendasikan

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta Anggara, Sahya. 2014. "Kebijakan Publik."
- Fahriza. (2021) Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar
- Fallo A. (2021) Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data Penduduk Kabupaten Teluk Wondama.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Stunting di Indonesia.
- Moleong, J. L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (I. Tufik (ed.); 36 ed.)*. PT. Remaja Rosdakarya offset
- Shaum, Udzrotu. (2022) Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Pencegahan Stunting Terintegritas
- Sujarweni, V. W. (2019). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.
- Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). (2022). Kementerian Kesehatan.
- Van Meter, D. S., & Carl E, V. H. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society*.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Kedua)*. Bumi Aksara.
- WHO. (2015). Definisi dan Kondisi Stunting.

Yusuf, M. (2017). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian.

Anggara Setya Saputra, Suryoto, dan Chamid Sutikno. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga*.  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/8335/4636>

Aprilia Kinanti dan Rahmadani Yusran. (2022). *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat*.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3029343&val=14527&title=Implementasi%20Kebijakan%20Pencegahan%20dan%20Penanggulangan%20Stunting%20Berbasis%20Nagari%20di%20Nagari%20Kajai%20Pasaman%20Barat>

Dian Rosa Sunaryo, Candra Dewini, dan Ria Arifianti. (2021). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung*.  
<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>

Erina Fahzira. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar*.  
<https://repository.uin-suska.ac.id/56945/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>

Ilham Nur Hanifan Maulana, Qomariyatus Sholihah, dan Wike. (2022). *Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang*.  
<https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1172>

